



**BUPATI BUTON**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON**

**NOMOR 22 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA DAHIANGO KECAMATAN MAWASANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan usul masyarakat dan untuk peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan perlu diadakan Pembentukan Desa Dahiango Kecamatan Mawasangka ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Dahiango Kecamatan Mawasangka ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Daerah Kabupaten Buton ( Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 3 ) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 11 ) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004 Nomor 1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

*d a n*

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PEMBENTUKAN DESA DAHIANGO KECAMATAN MAWASANGKA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Dahiango.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

#### Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Dahiango Kecamatan Mawasangka dalam Wilayah Kabupaten Buton di Propinsi Sulawesi Tenggara.

#### Pasal 3

- (1) Wilayah Desa Dahiango terdiri atas :
  - a. Dusun Dahiango I;
  - b. Dusun Dahiango II.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Dahiango berkedudukan di Dusun Dahiango I.

#### Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Dahiango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka luas Wilayah Desa Kanapa-napa berkurang seluas Wilayah Desa Dahiango.

#### Pasal 5

- (1) Desa Dahiango Kecamatan Mawasangka mempunyai batas-batas, sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kanapa-napa.

- (2) Batas-batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan Batas Wilayah Desa Dahiango Kecamatan Mawasangka secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 6

Perubahan Nama dan Batas Desa / Dusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton berdasarkan usulan masyarakat dengan memperhatikan latar belakang dan nilai-nilai budaya setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 7

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Desa Dahiango, diangkat seorang Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

##### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Disahkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 27 J u n i 2005

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

**Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR**

Diundangkan di P a s a r w a j o  
pada tanggal 29 J u n i 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap/ttd

**Drs. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d

NIP. 010110307

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON*

*TAHUN 2005 NOMOR : 22*